

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	22
1.3. Tujuan Penelitian.....	23
1.4. Manfaat Penelitian.....	23
1.5. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJUAN PUSTAKA	28
2.1. Landasan Teori.....	28
2.1.1. Tindak Pidana.....	28
2.1.2. Kepastian Hukum	41
2.1.3. Penegakan Hukum.....	43
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana	51

2.2. Landasan Konseptual	64
2.2.1. Limbah	64
2.2.2. <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA).....	68
2.2.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Delik Lingkungan	77
2.2.4. <i>Strict Liability</i>	80
2.2.5. Konsep Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia	88
2.2.6. Harmonisasi.....	98
2.2.7. Sinkronisasi Hukum.....	103
2.2.8. Konsistensi	104
2.2.9. Kriminalisasi Korporasi Pasca Penghapusan FABA dari Kategori Limbah B3	108
 BAB III METODE PENELITIAN	120
3.1. Jenis Penelitian.....	120
3.2. Jenis Data.....	123
3.3. Cara Perolehan Data.....	125
3.4. Jenis Pendekatan	125
3.5. Analisis Data.....	128
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	130
4.1. Hasil Penelitian	130

4.2. Analisis Pengaturan Limbah FABA (<i>Fly Ash & Bottom Ash</i>) pada Sistem Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia	145
4.3. Analisis Dampak Konflik Norma antara PP No. 22 Tahun 2021 dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Putusan Hakim atas Kasus PT Sinerga Nusantara Indonesia.....	163
4.3.1. Analisis Penerapan Hukum dalam Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri.....	173
4.3.2. Analisis Penerapan Hukum dalam Putusan oleh Hakim pada Mahkamah Agung.....	190
4.3.3. Analisis Ketidakpastian Hukum Akibat Konflik Norma pada PP No.22/2021.....	199
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	217
5.1. Kesimpulan	217
5.2. Saran	218
DAFTAR PUSTAKA.....	221

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Kimia <i>Fly Ash</i>	70
Tabel 2.2	Komposisi Batako dari FABA.....	72
Tabel 4.1	Perbandingan Ketentuan Pidana Administrasi pada Pasal 102 dan Pasal 109 sebelum dan sesudah diundangkannya UU Cipta Kerja.....	142